KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT		**Nomor SOP**	W.21-246.OT.02.02 TAHUN 2025
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 JANUARI 2025
		Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : I GUSTI PUTU MILAWATI NIP 197705092001122001
		Nama SOP	**SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT**

Dasar Hukum :		**Kualifikasi Pelaksana :**	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1	Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
2	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	2	Memiliki kemampuan menganalisa kasus kepegawaian terkait disiplin pegawai
3	Peraturan MenteriHukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	3	Memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik lisan maupun tulisan
4	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	4	Memiliki kemampuan memegang informasi bersifat rahasia
5	Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum		

Keterkaitan :	**Peralatan / perlengkapan :**	
	1	Komputer / Printer / Scanner
	2	Jaringan Internet
	3	Jaringan Telekomunikasi
	4	SIMPEG
	5	SUMAKER
	6	Alat Tulis Kantor

Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses pembinaan dan penegakan disiplin tidak akan berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pegawai ybs	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kakanwil	Tim Pemeriksa Kantor Wilayah	Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal	Menteri (Melalui biro SDM)	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Penjatuhan Hukuman Disiplin terindikasi menjadi Hukuman Disiplin Berat				MULAI			Hasil pemeriksaan hukuman disiplin sebelumnya	1 Hari	Kesepakatan tim pemeriksa	
2	Usul tim pemeriksa gabungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum							Usulan Tim Pemeriksa	10 menit	Usulan Tim Pemeriksa	
3	Terbit SK Tim Pemeriksa Gabungan							SK Tim Pemeriksa	1 Hari	SK Tim Pemeriksa	
4	Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap pegawai ybs							Surat pemanggilan pemerisaan	1 Hari	Persetujuan pemeriksaan	pemanggilan dilakukan sebanyak 2x, jika pegawai ybs tidak memenuhi panggilan tersebut maka proses penjatuhan hukuman disiplin akan dilanjutkan ketahap selanjutnya
5	Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan							BAP dan Telaah	30 menit	BAP	
6	Tim Pemeriksa membuat BAP dan telaah penjatuhan hukuman disiplin							BAP dan Telaah	30 menit	BAP	
7	Pembuatan LHP dan usul SK Penjatuhan Hukuman Disiplin							LHP dan Usulan	2 Hari Kerja	LHP dan Usulan	
8	Penandatanganan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin							Draft SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	3 Hari Kerja	SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	
9	SK Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima oleh pegawai ybs							SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	1 Hari Kerja	Tanda terima SK Penjatuhan Hukuman Disiplin	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi